

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki sistem pemerintahan yang terbagi menjadi dua, yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian ini dilakukan untuk untuk mengefisienkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian pemerintah pusat adalah penguasa yang bertugas di pusat, melingkungi seluruh pemerintah daerah. Pemerintahan pusat melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak diselenggarakan daerah otonom. Sedangkan Pemerintah daerah, berdasarkan undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menurut Fungsinya Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah, Pemerintah daerah juga wajib bertanggung jawab atas kegiatannya tersebut dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan laporan keuangan untuk menilai tingkat kewajaran laporan keuangan tersebut. Apakah sesuai atau tidak dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah. BPK RI akan mengeluarkan output berupa laporan hasil pemeriksaan dimana salah satu isinya berupa opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*);
2. Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)
3. Tidak Wajar (*adverse opinion*)
4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*disclaimer of opinion*)

Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*) adalah opini yang paling baik diantara yang lainnya. Sehingga para pemerintah daerah ingin mendapatkan opini

tersebut. Untuk mendapatkan opini tersebut ada beberapa kriteria yang mempengaruhi penilaian, Menurut UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara kriteria tersebut terdiri dari:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*)
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Pada tahun 2016 Pemerintahan Kota Madiun mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*) dan setelah itu 3 kali berturut Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*) pada tahun berikutnya, yakni 2017-2019. Berdasarkan hal tersebut pada penulis ingin menganalisis kesesuaian Opini dan temuan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini berjudul “Analisis Opini dan Temuan BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2016-2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah hasil opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah daerah Kota Madiun telah sesuai dengan kriteria penentuan opini pada UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

2. Bagaimana kesesuaian antara temuan audit BPK terhadap laporan keuangan Pemda Kota Madiun dengan Juknis Penetapan Batas Materialitas Pemeriksaan Keuangan BPK RI?
3. Apa yang menyebabkan tahun 2016 Pemda Kota Madiun mendapatkan opini WDP dibanding tahun 2017-2019 yang mendapatkan opini WTP?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini terkait dengan rumusan masalah yang diatas adalah:

1. Mengetahui apakah hasil opini BPK RI terhadap laporan keuangan pada Pemda Kota Madiun telah sesuai dengan kriteria penentuan opini pada UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
2. Mengetahui kesesuaian antara temuan audit BPK terhadap laporan keuangan Pemda Kota Madiun dengan Juknis Penetapan Batas Materialitas Pemeriksaan Keuangan BPK RI.
2. Mengetahui penyebab tahun 2016 Pemda Kota Madiun mendapatkan opini WDP dibanding tahun 2017-2019 yang mendapatkan opini WTP

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam karya tulis ini, Penulis sadar dengan keterbatasan dalam pengambilan data dan faktor-faktor lainnya, maka dari itu penulis membatasi masalah yang dibahas yakni kesesuaian antara opini yang diberikan oleh BPK RI terhadap laporan keuangan Pemda Kota Madiun tahun 2016-2019 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat pada penelitian kali ini, yaitu:

1. Bagi Umum, Memberikan pengetahuan bagaimana kesesuaian opini audit opini BPK RI dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
2. Bagi Penulis, dapat menjadi wawasan pengetahuan yang baru terkait dengan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Bagi Pemerinta Daerah Kota Madiun, Dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menyampaikan latar belakang masalah mengenai topik yang dibahas, rumusan masalah yang menjadi topik pembahasan yang akan dibahas dalam karya tulis ini oleh penulis, lalu terdapat penulisan terkait tujuan penulis membuat karya tulis, kemudian ruang lingkup penulisan yang menjelaskan batasan-batasan yang penulis. Selain itu, terdapat manfaat penulisan yang diharapkan oleh penulis. Dan bagian yang terakhir terdapat metode pengumpulan data, yang menjelaskan bagaimana cara penulis mengumpulkan data untuk menjawab rumusan masalah.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai gambaran umum terkait BPK RI seperti visi dan misi, struktur organisasi, dan profil singkat. Selain itu, penulis juga akan menulis mengenai profil singkat dari Pemerintah Daerah Kota Madiun

yang meliputi visi dan misi, jumlah penduduk, struktur organisasi, dan profil singkat. Pada bab ini juga penulis juga akan menjelaskan teori apa saja yang melandasi topik karya tulis ilmiah. Penulis juga akan memberikan gambaran tentang data LKPD Pemerintah Daerah Kota Madiun. Data yang disajikan meliputi anggaran dan realisasi belanja serta pendapatan Pemerintah Daerah Kota Madiun pada tahun 2016-2019.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan topik yaitu analisis opini dan temuan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemda Kota Madiun tahun 2016-2019. Pada bab ini penulis akan menganalisis data yang telah dikumpulkan dan membandingkan dengan teori yang digunakan sebagai landasan teori pada bab sebelumnya.

BAB IV KESIMPULAN

Pada bab ini berisi bagian penutup dari karya tulis ilmiah ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan dari hasil analisis kesesuaian opini audit dan temuan BPK RI terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah sudah sesuai atau tidak. Selain itu, penulis akan menyampaikan saran jikalau opini audit dan temuan BPK RI tidak sesuai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.